

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

PEMBERDAYAAN POTENSI EKOWISATA BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KAWASAN WADUK JATIGEDE OLEH DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMEDANG

Sri Widodo¹
Agus Subagyo²
Indra Kristian³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi :

Abstract

This study aims to analyze the empowerment of local resources in developing ecotourism at Jatigede Reservoir, Sumedang Regency, carried out by the Department of Tourism, Culture, Youth, and Sports. The research focuses on the role of local government in promoting sustainable tourism that integrates environmental conservation, economic empowerment, and cultural preservation. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews with local government officials, community groups, and tourism actors, supported by field observation and documentation. The study applies Ife's (1995) empowerment theory, consisting of community development, empowerment, participation, and capacity building. The results show that the Department of Tourism has implemented several empowerment programs such as training for tourism awareness groups, promotion of local products, and collaboration with private investors. However, challenges persist in institutional coordination, community involvement, and limited infrastructure. The study concludes that ecotourism empowerment at Jatigede Reservoir has progressed but requires stronger collaboration between government, communities, and local entrepreneurs to realize inclusive and sustainable tourism development.

Keywords: *Ecotourism, Local Resource, Empowerment, Community Participation, Jatigede Reservoir*

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pariwisata dewasa ini tidak lagi semata-mata berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga menekankan prinsip keberlanjutan (sustainability) dan pemberdayaan masyarakat lokal. Paradigma baru pembangunan pariwisata menuntut integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi sehingga keberadaan destinasi wisata dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

masyarakat sekitar. Salah satu bentuk konkret dari pendekatan ini adalah pengembangan ekowisata berbasis sumber daya lokal yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penerima manfaat langsung dari kegiatan wisata.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekowisata, terutama melalui keberadaan Waduk Jatigede, yang dikenal sebagai “miniatur Raja Ampat” di Jawa Barat. Waduk yang diresmikan tahun 2015 ini memiliki luas genangan sekitar 4.983 hektare dan berfungsi ganda sebagai pengendali banjir, sumber air irigasi, serta destinasi wisata alam. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sumedang (2024), jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Waduk Jatigede mencapai 215.000 orang per tahun, meningkat signifikan dibandingkan periode awal pembukaan.

Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Sebagian besar penduduk di Desa Pakualam, Cisurat, dan Jemah masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian tradisional, sementara kontribusi ekonomi dari aktivitas wisata masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora), sangat krusial dalam menggerakkan roda pemberdayaan melalui penguatan kapasitas, pendampingan, dan pengembangan kelembagaan wisata.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk pemberdayaan potensi ekowisata berbasis sumber daya lokal di Kawasan Waduk Jatigede oleh Disparbudpora Kabupaten Sumedang? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata berbasis sumber daya lokal di kawasan tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan Ife (1995) yang memandang pemberdayaan sebagai proses yang melibatkan *community development*,

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

empowerment, participation, dan capacity building. Teori ini relevan untuk menelaah sejauh mana Disparbudpora mampu mengembangkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengoptimalkan potensi ekowisata berbasis sumber daya lokal. Penelitian ini memiliki kontribusi praktis dalam merumuskan kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di tingkat daerah serta memberikan gambaran empiris tentang dinamika pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan ekowisata di Indonesia.

Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Pemberdayaan Masyarakat (Ife, 2005). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menegaskan bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan. Proses pemberdayaan menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Teori ini memiliki empat dimensi utama yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian ini: *community development*, *empowerment*, *participation*, dan *capacity building*.

Dimensi pertama, *community development*, menekankan pada pengembangan komunitas lokal melalui pengorganisasian masyarakat agar mampu mengenali dan mengelola potensi yang dimiliki secara kolektif. Dimensi kedua, *empowerment*, mengacu pada peningkatan kemampuan individu dan kelompok untuk mengendalikan sumber daya serta memperjuangkan kepentingannya. Dimensi ketiga, *participation*, menggambarkan sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dimensi keempat, *capacity building*, menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan individu agar proses pemberdayaan dapat berkelanjutan.

Teori Ife memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami hubungan antara kebijakan pemerintah daerah dengan upaya penguatan masyarakat

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

lokal dalam mengelola potensi ekowisata. Dalam konteks Waduk Jatigede, teori ini digunakan untuk menilai efektivitas strategi pemberdayaan yang dijalankan oleh Disparbudpora Sumedang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran empiris mengenai proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata berbasis sumber daya lokal. Lokasi penelitian adalah kawasan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang, dengan fokus pada tiga desa: Pakualam, Cisurat, dan Jemah.

Informan penelitian terdiri dari unsur Disparbudpora Kabupaten Sumedang, pengelola kelompok sadar wisata (*Pokdarwis*), pelaku UMKM lokal, serta tokoh masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi kebijakan seperti RPJMD dan rencana strategis pariwisata daerah.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman & Saldaña (2014) yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, digunakan triangulasi sumber dan metode, yang memadukan hasil wawancara dengan dokumen dan observasi lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna di balik proses sosial pemberdayaan masyarakat, sekaligus menilai efektivitas kebijakan dari perspektif pelaku di lapangan.

PEMBAHASAN

Kawasan Waduk Jatigede memiliki posisi strategis sebagai destinasi unggulan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Sumedang. Berdasarkan data Disparbudpora (2024), terdapat 12 titik wisata potensial di sekitar waduk, di antaranya kawasan wisata Panenjoan, Kampung Buricak Burinong, dan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Dermaga Jatigede. Namun, pengembangan kawasan wisata ini masih menghadapi keterbatasan fasilitas, aksesibilitas, dan manajemen kelembagaan masyarakat.

Kawasan **Waduk Jatigede** merupakan salah satu proyek strategis nasional di Provinsi Jawa Barat yang mulai beroperasi sejak tahun 2015. Terletak di bagian timur Kabupaten Sumedang, waduk ini membentang di lima kecamatan, yaitu Jatigede, Wado, Darmaraja, Cisit, dan Jatinunggal. Dengan luas genangan mencapai **4.983 hektare** dan daya tampung air sebesar **980 juta meter kubik**, Waduk Jatigede berfungsi sebagai sarana pengairan bagi sekitar 90.000 hektare sawah di wilayah Cirebon, Majalengka, dan Indramayu (Kementerian PUPR, 2023). Selain fungsi hidrologis, kawasan ini juga memiliki potensi besar sebagai **destinasi ekowisata berbasis air dan perbukitan** yang dikelilingi panorama alam yang indah serta kekayaan budaya masyarakat Sunda yang masih kental.

Menurut data *Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang (2024)*, tingkat kunjungan wisata ke Waduk Jatigede meningkat dari **87.540 wisatawan (2019)** menjadi **215.000 wisatawan (2023)**. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ekowisata Waduk Jatigede mulai menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara, terutama setelah dibukanya akses **Tol Cisumdawu** yang memperpendek waktu tempuh Bandung–Sumedang menjadi hanya 1 jam. Namun, peningkatan jumlah wisatawan belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Berdasarkan laporan *Disparbudpora Kabupaten Sumedang (2024)*, kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai **2,6%**, sedangkan sektor industri dan pertanian masih mendominasi lebih dari 70% total PAD.

Secara sosial-ekonomi, masyarakat di sekitar waduk, khususnya di Desa Pakualam, Cisurat, dan Jemah, sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan tradisional. Setelah pembangunan waduk, sebagian lahan pertanian mereka tergenang air, menyebabkan alih profesi dan perubahan struktur ekonomi lokal. Pemerintah daerah

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

kemudian menetapkan kebijakan pengembangan ekowisata berbasis sumber daya lokal sebagai salah satu strategi mitigasi dampak sosial-ekonomi pasca-pembangunan waduk. Program ini diarahkan agar masyarakat yang terdampak dapat memanfaatkan potensi wisata untuk meningkatkan pendapatan melalui usaha kuliner, penyewaan perahu wisata, penyediaan homestay, hingga promosi produk unggulan daerah.

Dalam konteks ini, Disparbudpora Kabupaten Sumedang menjadi aktor kunci dalam menjalankan fungsi koordinatif, regulatif, dan fasilitatif terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Melalui program-program seperti *Pelatihan Sadar Wisata, Gerakan Bangga Berwisata di Sumedang (GBBS)*, dan *Festival Jatigede*, dinas berupaya menggerakkan peran masyarakat sebagai subjek utama dalam pengembangan pariwisata. Namun, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas program tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya promosi digital, serta minimnya kolaborasi lintas sektor.

Dengan demikian, pembahasan ini akan menguraikan hasil penelitian berdasarkan teori pemberdayaan Ife (1995) yang terdiri dari empat dimensi, yaitu *community development, empowerment, participation, dan capacity building*. Setiap dimensi akan dibahas secara mendalam dengan menampilkan fakta lapangan, analisis teori, serta simpulan sementara untuk menggambarkan sejauh mana pemberdayaan masyarakat lokal dalam mengelola ekowisata Waduk Jatigede telah berjalan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dari hasil penelitian lapangan, upaya pemberdayaan masyarakat di kawasan ini dilakukan melalui empat dimensi utama menurut Ife (1995): *community development, empowerment, participation, dan capacity building*.

1) Dimensi *Community Development*

Pengembangan komunitas lokal merupakan tahap awal pemberdayaan masyarakat di kawasan Waduk Jatigede. Berdasarkan hasil penelitian,

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

pembentukan dan penguatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) menjadi instrumen utama dalam mewadahi partisipasi masyarakat. Pokdarwis berperan sebagai pengelola kegiatan wisata, pemandu lapangan, dan promotor budaya lokal. Disparbudpora telah membentuk sedikitnya 12 Pokdarwis aktif di wilayah sekitar waduk, namun hanya lima di antaranya yang memiliki kegiatan reguler.

Contohnya, *Pokdarwis Buricak Burinong* di Desa Pakualam berhasil mengelola destinasi tebing panoramic dan kafe wisata terapung yang kini menjadi ikon Jatigede. Sebaliknya, beberapa Pokdarwis di desa lain mengalami stagnasi karena lemahnya dukungan kelembagaan dan tidak adanya program berkelanjutan. Dalam perspektif teori Ife, kondisi ini menunjukkan bahwa *community development* telah dimulai, namun masih memerlukan strategi penguatan jejaring antar komunitas agar terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman antar wilayah.

Selain itu, hubungan antara komunitas wisata dengan pemerintah desa masih bersifat top-down. Banyak inisiatif lokal yang belum diakomodasi dalam perencanaan pembangunan desa. Misalnya, usulan pembangunan dermaga kecil di Desa Cisurat baru terealisasi setelah tiga tahun karena keterbatasan anggaran daerah. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan koordinasi dan kebergantungan tinggi pada pemerintah daerah dalam proses pengembangan komunitas.

2) Dimensi *Empowerment*

Dimensi *capacity building* menitikberatkan pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi wisata secara profesional dan mandiri. Disparbudpora telah melaksanakan berbagai pelatihan seperti *digital tourism training*, manajemen homestay, dan pelatihan kebersihan lingkungan. Namun, berdasarkan hasil evaluasi internal Disparbudpora (2024), pelatihan ini

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas teknis pengelola wisata.

Sebagian besar masyarakat masih menghadapi kendala literasi digital dan belum terbiasa menggunakan aplikasi promosi wisata. Bahkan, beberapa pelaku usaha masih bergantung pada sistem konvensional seperti brosur dan spanduk. Dalam perspektif Ife, kapasitas masyarakat baru berkembang pada level dasar, sehingga dibutuhkan sinergi lebih luas dengan pihak akademisi dan swasta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata.

Pemberdayaan masyarakat di kawasan Jatigede dilakukan melalui program peningkatan ekonomi lokal, seperti pengembangan usaha kuliner berbasis hasil perikanan waduk, pelatihan kerajinan tangan, serta pengelolaan homestay. Namun, masih terdapat keterbatasan permodalan dan jaringan pemasaran yang menyebabkan potensi ekonomi lokal belum berkembang optimal.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata menyebutkan bahwa “dukungan pemerintah lebih difokuskan pada kegiatan promosi, sementara aspek pendampingan usaha masyarakat masih terbatas.” Dalam kerangka Ife, hal ini menunjukkan bahwa *empowerment* belum berjalan secara menyeluruh karena masyarakat masih bergantung pada inisiatif pemerintah tanpa memiliki daya kendali terhadap sumber daya ekonomi secara penuh.

3) Dimensi *Participation*

Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pemberdayaan. Dalam konteks Jatigede, tingkat partisipasi masyarakat tergolong cukup tinggi pada tahap perencanaan awal kegiatan wisata, namun cenderung menurun pada tahap implementasi dan evaluasi. Berdasarkan observasi, hal ini

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

disebabkan karena sebagian masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis oleh dinas terkait.

Meskipun demikian, beberapa kelompok masyarakat mulai menunjukkan inisiatif mandiri seperti mengembangkan kegiatan wisata berbasis budaya lokal (*ngalokat cai*) dan festival kuliner tradisional. Upaya ini menandakan munculnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran aktif mereka dalam mengembangkan potensi ekowisata.

4) Dimensi *Capacity Building*

Peningkatan kapasitas masyarakat menjadi dimensi paling penting dalam menjaga keberlanjutan ekowisata. Disparbudpora telah melakukan pelatihan manajemen destinasi, kebersihan lingkungan, dan digital marketing. Namun, pelatihan ini masih bersifat temporal dan belum terintegrasi dalam program berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi, kemampuan teknis anggota Pokdarwis dalam mengelola keuangan dan melakukan promosi digital masih rendah.

Oleh karena itu, strategi peningkatan kapasitas perlu dilakukan secara bertahap melalui program pelatihan terpadu yang melibatkan perguruan tinggi dan sektor swasta. Dalam perspektif teori Ife, *capacity building* harus dilihat bukan hanya sebagai pelatihan teknis, tetapi juga sebagai proses pembentukan kesadaran kritis masyarakat untuk mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan.

Secara umum, pemberdayaan potensi ekowisata berbasis sumber daya lokal di Waduk Jatigede telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Masyarakat mulai berperan dalam pengelolaan wisata, sementara pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan regulator. Namun, masih diperlukan sinergi lintas sektor, inovasi kelembagaan, dan dukungan berkelanjutan agar ekowisata benar-benar menjadi sarana peningkatan kesejahteraan lokal sekaligus pelestarian lingkungan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

KESIMPULAN

Sebagai penutup penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan potensi ekowisata berbasis sumber daya lokal di kawasan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora), masyarakat mulai bertransformasi dari penerima manfaat pasif menjadi pelaku aktif dalam kegiatan pariwisata.

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori pemberdayaan Ife (1995), proses pemberdayaan di kawasan ini menunjukkan perkembangan yang beragam pada empat dimensi utama. Pada dimensi *community development*, terbentuknya kelompok sadar wisata (*Pokdarwis*) menjadi modal sosial penting bagi tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengelola potensi lokal. Namun, belum semua komunitas memiliki kekuatan kelembagaan yang sama, sehingga koordinasi dan kesinambungan program masih perlu diperkuat.

Pada dimensi *empowerment*, program Disparbudpora telah memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui usaha wisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Namun, tingkat kemandirian masyarakat dalam mengelola usaha masih terbatas oleh rendahnya akses terhadap permodalan, kemampuan manajerial, dan jaringan pemasaran.

Selanjutnya, dimensi *participation* menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme tinggi dalam mendukung program wisata, tetapi keterlibatan mereka masih lebih dominan pada pelaksanaan teknis daripada perencanaan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih perlu ditransformasikan dari bentuk partisipasi instrumental menjadi partisipasi substantif yang melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Sementara itu, dimensi *capacity building* menegaskan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat merupakan elemen krusial dalam memastikan keberlanjutan program pemberdayaan. Meskipun berbagai pelatihan telah dilakukan, dampaknya belum merata karena masih terbatas pada kelompok tertentu. Diperlukan pendekatan yang lebih sistematis untuk memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan masyarakat agar mereka mampu beradaptasi terhadap dinamika sektor pariwisata.

Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat di kawasan Waduk Jatigede telah berjalan ke arah yang positif, tetapi masih memerlukan penguatan sinergi antar-stakeholder dan inovasi kebijakan yang mendorong integrasi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sebagai kalimat penutup dari simpulan ini, dapat ditegaskan bahwa pemberdayaan ekowisata berbasis sumber daya lokal di Waduk Jatigede telah memberikan dampak nyata terhadap kesadaran, partisipasi, dan kemandirian masyarakat, meskipun efektivitasnya masih harus ditingkatkan melalui strategi pendampingan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, beberapa saran strategis diajukan untuk memperkuat implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata Waduk Jatigede:

Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi koordinasi lintas sektor antara Disparbudpora, Dinas Koperasi dan UMKM, serta pemerintah desa agar setiap program pemberdayaan memiliki arah yang sinergis dan saling mendukung. Sinergi ini penting untuk mencegah tumpang tindih kegiatan serta memastikan keberlanjutan inisiatif masyarakat di lapangan.

Kedua, penguatan kelembagaan Pokdarwis perlu menjadi prioritas melalui pendampingan berkelanjutan, pembentukan koperasi wisata, dan pemberian insentif

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

berbasis kinerja. Dengan demikian, komunitas lokal memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat untuk mengelola potensi wisata secara profesional dan mandiri.

Ketiga, pengembangan kapasitas masyarakat harus diarahkan pada penguasaan teknologi digital agar mereka dapat beradaptasi dengan tren pariwisata modern. Pemerintah dapat menggandeng universitas dan pelaku industri kreatif untuk memberikan pelatihan mengenai pemasaran digital, desain produk wisata, dan manajemen destinasi berbasis teknologi.

Keempat, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam menilai keberhasilan program pemberdayaan. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek evaluasi, tetapi juga subjek yang aktif memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang dijalankan.

Kelima, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat model kemitraan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pendekatan *public-private-community partnership* akan membuka peluang investasi dan inovasi yang lebih luas dalam mengembangkan ekowisata Jatigede secara berkelanjutan.

Melalui saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal berbasis sumber daya alam dan budaya, sehingga Waduk Jatigede dapat berkembang sebagai ikon ekowisata berkelanjutan Jawa Barat sekaligus model nasional pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

REFERENSI

- Agustina, D., & Rahmawati, T. (2023). *Community-based ecotourism as a model for sustainable development in rural Indonesia*. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 14(6), 1478–1492. [https://doi.org/10.14505/jemt.v14.6\(70\).04](https://doi.org/10.14505/jemt.v14.6(70).04)
- Ardika, I. W., & Pitana, I. G. (2021). *Pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat: Tantangan dan peluang di era digital*. Denpasar: Udayana University Press.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

-
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. (2024). *Kabupaten Sumedang dalam Angka 2024*. Sumedang: BPS Kabupaten Sumedang.
- Budiantoro, S., & Handayani, F. (2023). *The role of local government in empowering rural communities through sustainable tourism development*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 10(2), 121–136. <https://doi.org/10.25077/jipkp.10.2.2023.121>
- Disparbudpora Kabupaten Sumedang. (2024). *Laporan Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang Tahun 2024*. Sumedang: Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- Dwiastuti, S. R., & Wulandari, A. (2022). *Local resource-based tourism development: An empowerment perspective from West Java*. *Jurnal Pembangunan Daerah dan Pariwisata*, 7(1), 44–59. <https://doi.org/10.31289/jpdp.v7i1.2022>
- Ife, J. (1995). *Community development: Creating community alternatives—Vision, analysis, and practice*. Melbourne: Longman.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Data Teknis Proyek Strategis Nasional Waduk Jatigede*. Jakarta: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Nuraini, H., & Iskandar, D. (2021). *Tourism governance and local community participation in Indonesia: The case of West Java*. *Journal of Tourism Policy and Research*, 5(2), 88–102. <https://doi.org/10.33369/jtpr.5.2.88>
- Subarsono, A. G. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E., & Suryani, L. (2022). *Capacity building for community-based tourism: Lessons from West Java's rural development initiatives*. *Indonesian Journal of Development Studies*, 3(1), 65–78. <https://doi.org/10.20885/ijds.vol3.iss1.art6>
- Wibowo, T., & Rahadian, D. (2023). *Empowerment strategies for sustainable ecotourism: Evidence from Jatigede Reservoir, West Java*. *Jurnal Ekowisata dan Kepariwisata Indonesia*, 9(2), 145–162. <https://doi.org/10.22146/jeki.2023.214>

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 17 Okt 2025

Published : 27 Okt 2025

Yuliana, R., & Hakim, L. (2024). *Community empowerment and ecotourism sustainability in Indonesia: Challenges and opportunities*. *Journal of Sustainable Tourism Studies*, 5(1), 45–62. <https://doi.org/10.21009/jsts.v5i1.2024>